Kamis, 24 April 2025

Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270 Indonesia

Website:
http://ksap.dpr.go.id/

Twitter:
@bksapdprri

Instagram:
@bksapdpr

YouTube:
BKSAP DPR RI

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemennegara lain, baik secara bilateralmaupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Delegasi DPR RI Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Parlemen yang Lebih Inklusif dan Responsif Gender

[Kuching, 24/04/25] Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menghadiri Pertemuan Komite Koordinasi Ke-4 Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA), sebuah wadah kerjasama anggota parlemen perempuan di lingkungan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Kuching, Sarawak, Malaysia. Pertemuan ini bertajuk "Mengarahkan Inovasi, Inklusivitas, dan Keberagaman Melalui Parlemen yang Berimbang Gender untuk ASEAN yang Siap Menghadapi Masa Depan." Dipimpin oleh Adde Rosi Khairunnisa dari Fraksi Golkar, pertemuan ini membahas tindak lanjut terhadap Rencana Aksi Women's Political Participation and Leadership (WPPL) 2024-2030 di lingkungan ASEAN.

Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan sejumlah pandangan substansif yang menegaskan komitmen parlemen Indonesia dalam mendorong partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan di kawasan ASEAN.

Marlyn Maisarah, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan bahwa keseimbangan gender di parlemen merupakan kunci untuk mendorong kebijakan publik yang lebih responsif dan berkeadilan. "Kami menekankan bahwa parlemen yang berimbang secara gender cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak, khususnya dalam hal investasi pada sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih kuat," ujarnya dalam forum tersebut.

Pertemuan anggota parlemen perempuan dari negara-negara ASEAN ini juga mengagendakan refleksi terhadap kelembagaan WAIPA. Seiring perkembangan global terkait partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik, Sekretariat AIPA melontarkan usulan untuk melakukan perubahan atas Aturan Tata Tertib WAIPA. Merespon hal tersebut, Melly Goeslaw menyampaikan bahwa Indonesia mendorong pemanfaatan secara maksimal atas Aturan Tata Tertib WAIPA yang saat ini berlaku. Indonesia juga terbuka untuk mendengarkan pandangan dari parlemen negara anggota lainnya sebelum langkah lebih lanjut dipertimbangkan bersama, khususnya terkait konsekuensi dari Rencana Aksi WPPL 2024-2030 dan dinamika global terkini, dengan catatan para parlemen nasional negara anggota AIPA juga bersama-sama menyepakati urgensi tersebut.

Dalam hal inklusivitas, Melly Goeslaw juga menegaskan pentingnya dialog lintas parlemen secara reguler. "Pelatihan dan pertukaran pengetahuan tidak hanya diperlukan untuk anggota parlemen perempuan, tetapi juga sistem pendukungnya. Ini bagian dari komitmen kita dalam menjaga agar parlemen tetap inklusif dan relevan di masa depan," tambahnya.

Selain aspek kelembagaan, aspek budaya politik juga menjadi perhatian penting Indonesia dalam forum ini. Dalam salah satu sesi, Adde Rosi Khairunnisa, menyoroti pentingnya membangun budaya politik yang aman dan adil bagi perempuan di tingkat lokal. "Kami melihat bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal representasi, tetapi bagaimana kita membangun lingkungan politik yang benar-benar mendukung perempuan untuk memimpin. Ini bukan pekerjaan satu negara saja, tapi kerja kolektif ASEAN," tegasnya.

Partisipasi aktif delegasi Indonesia di forum ini mencerminkan peran diplomasi parlemen dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama regional yang lebih inklusif, dengan Indonesia terus mengambil peran aktif dalam mendorong transformasi regional yang lebih setara dan inklusif.

(*****)